



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU**

**RENJA**

**2022**

**RUMUSAN RENCANA  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Berkenan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah yang Akuntabel, Efisien, Responsive dan Transparansi guna memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan limpahan Berkah dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan Negara khususnya Daerah Maluku tercinta ini.

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2022 ini merupakan gambaran rencana kerja yang komprehensif terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Biro Organisasi dalam Tahun Anggaran 2019-2024.

Semoga Renja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja ke depan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Baik dari aspek perencanaan maupun pengorganisasian.

Ambon, April 2021

Plt. Kepala Biro Organisasi  
Setda Maluku,



**DAVID S. KATAYANE, SE. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670604 200003 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) unit kerja tahun 2022 harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi/unit kerja dan memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Unit Kerja tahun lalu serta tujuan, sasaran, program/kegiatan tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setda Maluku menyampaikan Renja Biro Organisasi Tahun 2022 sebagai pelaksanaan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Biro Organisasi Setda Maluku 2019-2024.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Maluku adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Rencana Strategi (Renstra) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Maluku memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### 1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Maluku.

#### 2. Tujuan

Untuk mengetahui Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan dalam program kerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Organisasi Setda Maluku.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Pengukuran Kinerja
- 2.3. Analisa dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 2.4. Analisa Capaian Keuangan
- 2.5. Masalah dan Hambatan
- 2.6. Solusi Pemecahan Masalah dan Hambatan

## Bab III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

## Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD**

Pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan dimensi formal maupun moral yang melekat dan diemban oleh setiap instansi penyelenggara pemerintah. Salah satu wujud pertanggungjawaban itu adalah perhitungan (*accountability*) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi atau satuan kerja pemerintahan.

Biro Organisasi Setda Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui sistem pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability System*) ini, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat dilakukan analisis berbagai upaya yang harus dilakukan guna memecahkan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi Biro Organisasi Setda Maluku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setda Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui sistem pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability System*) akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan khususnya selama tahun 2020. Selain itu melalui sistem pertanggungjawaban kinerja ini pula seluruh *stakholder* akan dapat mengetahui capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauh mana penyimpangan maupun kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Untuk memudahkan para *stakeholders* (khususnya Gubernur Maluku dan Instansi Penilai Akuntabilitas) mengetahui informasi kinerja dan keuangan, maka secara sistematis pertanggungjawaban (*accountability*) kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020**

Salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran kinerja yang merupakan hal yang penting dalam manajemen program/kegiatan secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feedback*), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dalam mencapai keberhasilan di masa mendatang. Artinya bahwa melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka program/kegiatan instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dapat dilakukan secara lebih objektif.

Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Bersandar pada penegasan dimaksud, maka diketahui bahwa komponen strategis pengukuran kinerja adalah pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja kegiatan maupun sasaran dalam setahun.

## **2.3 Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Adapun Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2020 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
2	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	16%
		Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	27%
		Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	16%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :	
		1. Standar Pelayanan 2. Standar Operasional Prosedur 3. Maklumat Pelayanan 4. Kode Etik Layanan 5. Peta Proses Bisnis	16% 16% 16% 16% 16%
	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :		



		1. Standar Pelayanan 2. Standar Operasional Prosedur 3. Maklumat Pelayanan 4. Kode Etik Layanan 5. Peta Proses Bisnis	27% 27% 27% 27% 27%
3	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Guna	100%
		Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	85%
4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan : 1. Anjab dan ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	100% 5% 100%
		Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang dilakukan penataan : 1. Anjab dan ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	27% 27% 27%
5	Meningkatnya Adminnistrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang tercapai	100%

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Kinerja yang dicapai oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku
-----------	--

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Meningkatnya Implementasi SAKIP Pemprov Maluku”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**  
**Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	95.34%	95.34
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>97.67</b>

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1**  
**antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	97,67%	97,67%	95.34%	95.34%

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1**  
**Tahun 2019 dan 2020 serta Tahun Akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	97,67%	95.34%	100%

Capaian Kinerja dari “Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja OPD Lingkup Pemda Provinsi Maluku Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja dari “Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” adalah sebesar 95,34%, hal ini dikarenakan dari 43 OPD Lingkup Pemda Provinsi Maluku terdapat 2 OPD yakni Biro Humas dan Protokol Setda Maluku dan Biro Pengelola Perbatasan Negara yang sampai batas waktu penyampaian dokumen LKIP (30 April 2020) dan sampai saat dilakukan evaluasi tidak dapat menyajikan dokumen LKIP OPDnya. Sehingga hanya sebanyak 42 OPD (97,67%) Lingkup Pemda Provinsi Maluku yang telah menyusun LKIP OPD sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku” dikarenakan pendampingan oleh Biro Organisasi Setda Maluku kepada OPD Lingkup Provinsi Maluku dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 yang cukup maksimal sebelum dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi Maluku. Dengan demikian penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan LKIP OPD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah” ditunjang oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD; dan Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab

dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 orang ASN dan 1 orang tenaga honorer.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Output yang dihasilkan adalah Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemda Provinsi Maluku Tahun 2019. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Terukurnya kinerja OPD Pemerintah Provinsi Maluku.

Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Output yang dihasilkan adalah Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemda Provinsi Maluku Tahun 2020. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Pemda Provinsi Maluku Tahun 2020 sebagai target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 1.

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**  
**Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku**

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>274,010,800</b>	<b>273,359,800</b>	<b>99.76</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	132,300,000	132,300,000	100
	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	141,710,800	141,059,800	99.54
<b>TOTAL</b>		<b>274,010,800</b>	<b>273,359,800</b>	<b>99.76</b>

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan pendampingan SAKIP pada OPD Lingkup Provinsi Maluku;
- 2) Penambahan/penguatan sumber daya aparatur Biro Organisasi dalam mengelola SAKIP;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan data kinerja berbasis teknologi informasi (e-SAKIP).

<b>SASARAN 2</b>	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah
------------------	---

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Meningkatnya Pelayanan Publik di Provinsi Maluku”**. Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Capaian Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	16%	8.57%	53.56
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	27%	18.18%	67.33
3	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	16%	30%	187.5
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:			
	1. Standar Pelayanan	16%	8.57%	53.56
	2. Standar Operasional Prosedur	16%	8.57%	53.56
	3. Maklumat Pelayanan	16%	8.57%	53.56
	4. Kode Etik Pelayanan	16%	5.71%	35.68
	5. Peta Proses Bisnis	16%	0	0

5	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:			
	1. Standar Pelayanan	27%	27%	100
	2. Standar Operasional Prosedur	27%	27%	100
	3. Maklumat Pelayanan	27%	27%	100
	4. Kode Etik Pelayanan	27%	27%	100
	5. Peta Proses Bisnis	27%	0	0
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>69.59</b>

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2**  
**antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	-	8.57%	53.56
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	-	18.18%	67.33
3	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	-	-	30%	187.5
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:				
	1. Standar Pelayanan	-	-	8.57%	53.56
	2. Standar Operasional Prosedur	-	-	8.57%	53.56
	3. Maklumat Pelayanan	-	-	8.57%	53.56
	4. Kode Etik Pelayanan	-	-	5.71%	35.68
	5. Peta Proses Bisnis			0	0

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
5	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:				
	1. Standar Pelayanan	-	-	27%	100
	2. Standar Operasional Prosedur	-	-	27%	100
	3. Maklumat Pelayanan	-	-	27%	100
	4. Kode Etik Pelayanan	-	-	27%	100
	5. Peta Proses Bisnis	-	-	0	0

**Tabel 2.8**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2**  
**Tahun 2019 dan 2020 serta Tahun akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	8.57%	100%
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	18.18%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	-	30%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:			
	1. Standar Pelayanan	-	8.57%	100%
	2. Standar Operasional Prosedur	-	8.57%	100%
	3. Maklumat Pelayanan	-	8.57%	100%
	4. Kode Etik Pelayanan	-	5.71%	100%
	5. Peta Proses Bisnis	-	0	100%
5	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :			

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1.	Standar Pelayanan	-	27%	100%
2.	Standar Operasional Prosedur	-	27%	100%
3.	Maklumat Pelayanan	-	27%	100%
4.	Kode Etik Pelayanan	-	27%	100%
5.	Peta Proses Bisnis	-	0	100%

Indikator Kinerja “Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"” dengan target 16%, ditahun 2020 yang sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan hasilnya “Baik” terdapat 3 (tiga) perangkat daerah atau 8.57%. Perangkat daerah tersebut adalah Dinas Penanaman Modan dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Pendapatan Daerah.

Indikator Kinerja “Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"” dengan target 27% atau 3 kabupaten/kota dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pada tahun 2020 kabupaten/kota yang sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Kabupaten Buru, Kota Ambon dan Kota Tual dari 3 kabupaten/kota tersebut yang IKMnya “Baik” adalah Kota Ambon dan Kota Tual atau dengan persentase 18.18%.

Indikator Kinerja “Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik” dengan target 16%, ditahun 2020 terdapat 3 perangkat daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah) akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 April 2020) inovasi pelayanan publik yang dimiliki ketiga perangkat daerah tersebut tidak didaftarkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator “Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” pada tahun 2020 ditargetkan 16% perangkat daerah yang telah



memiliki kebijakan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Perangkat daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modan dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 16% ditahun 2020, realisasinya adalah 8.57% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 53.56%.
- Perangkat daerah yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modan dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 16% ditahun 2020, realisasinya adalah 8.57% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 53.56%.
- Perangkat daerah yang telah memiliki Maklumat Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modan dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 16% ditahun 2020, realisasinya adalah 8.57% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 53.56%.
- Perangkat daerah yang telah memiliki Kode Etik Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modan dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari target 16% ditahun 2020, realisasinya adalah 5.71% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 35.68%.
- Belum ada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang telah memiliki Peta Proses Bisnis sesuai peraturan yang berlaku, sehingga realisasinya adalah 0% dan capaian kinerja adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang peta proses bisnis itu sendiri sehingga perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi belum memiliki pemahaman dalam menyusun peta proses bisnis diperangkat daerahnya masing-masing.

Indikator “Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3 kabupaten/kota (27%) dari total 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang telah memiliki kebijakan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kabupaten/kota yang telah memiliki Standar Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Tual. Dari target 27% (3 kabupaten/kota) ditahun 2020, realisasinya adalah 27% (3 kabupaten/kota) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
- Kabupaten/kota yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan yang berlaku adalah adalah Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Tual. Dari target 27% (3 kabupaten/kota) ditahun 2020, realisasinya adalah 27% (3 kabupaten/kota) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
- Kabupaten/kota yang telah memiliki Maklumat Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah adalah Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Tual. Dari target 27% (3 kabupaten/kota) ditahun 2020, realisasinya adalah 27% (3 kabupaten/kota) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
- Kabupaten/kota yang telah memiliki Kode Etik Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah adalah Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Tual. Dari target 27% (3 kabupaten/kota) ditahun 2020, realisasinya adalah 27% (3 kabupaten/kota) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
- Belum ada Kabupaten/kota yang telah memiliki Peta Proses Bisnis sesuai peraturan yang berlaku, sehingga realisasinya adalah 0% dan capaian kinerja adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang peta proses bisnis itu sendiri sehingga perangkat daerah dilingkup kabupaten/kota se-

Maluku belum memiliki pemahaman dalam menyusun peta proses bisnis diperangkat daerahnya masing-masing.

Capaian sasaran kinerja “Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah” ditahun 2020 adalah sebesar 69.59% atau dengan kategori “Baik” namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menyiapkan komponen kebijakan pelayanan publik pada perangkat daerahnya masing-masing.

Sasaran kinerja “Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah” ditunjang oleh Program Peningkatan Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku, Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi, dan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pengorganisasian. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang ASN dan 2 orang tenaga honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 2.

**Tabel 2.9**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima**  
**bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah**

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>220,767,837</b>	<b>204,394,287</b>	<b>92.58</b>
	Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik	77,343,000	67,605,650	87.41
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku	62,200,000	55,563,800	89.33

	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	43,722,500	43,722,500	100
	Rapat Koordinasi Bidang Pengorganisasian	37,502,337	37,502,337	100
	<b>TOTAL</b>	<b>220,767,837</b>	<b>204,394,287</b>	<b>92.58</b>

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Dibutuhkan komitmen dari pimpinan perangkat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh terutama dalam melengkapi komponen kebijakan pelayanan publik;
- 2) Dibutuhkan alokasi anggaran dalam melakukan sosialisasi terkait dengan peta proses bisnis;
- 3) Dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih memadai dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
- 4) Melakukan pengembangan kompetensi pegawai yang bertugas memberi pelayanan publik.

<b>SASARAN 3</b>	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
------------------	--

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	-	-
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	85%	-	-
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				-

**Tabel 2.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	-	-
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	-	-

**Tabel 2.12**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2019 dan 2020 serta Tahun akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	100%
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	100%

Capaian Sasaran Kinerja dari “Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran” tidak dapat dilakukan perhitungan capaian kinerjanya

dikarenakan anggaran yang mendukung sasaran kinerja tersebut mengalami pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Namun tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Maluku dalam penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap dilakukan seperti:

A. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
2. Melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.
3. Pembentukan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

B. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 06.1.1/3063 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
2. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 061.1/3061 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Unit

Kerja Setda Kota Ambon dan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

3. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 060/0269 tanggal 16 Januari 2020 perihal Persetujuan Penyesuaian Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130/0455 tanggal 30 Januari 2020 perihal Persetujuan Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 061/3676 tanggal 2 Desember 2020 perihal Rekomendasi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 445/3675 tanggal 2 Desember 2020 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 060/3945 tanggal 30 Desember 2020 perihal Rekomendasi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 3.

**Tabel 2.13**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Sasaran Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi**  
**Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Tidak ada Program/Kegiatan penunjang sasaran kinerja Tahun 2020. Dicoret untuk penanganan Covid-19	-	-	-
<b>T O T A L</b>	-	-	-

Untuk ditahun berikut dan tahun yang akan datang Sasaran Strategis “Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Asistensi dalam penyusunan regulasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk hukum kelembagaan pemerintah daerah baik lingkup Provinsi Maluku maupun Lingkup Kabupaten/Kota se-Maluku;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai sehingga seluruh indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan;
- 3) Penambahan ASN mengingat beratnya beban tugas yang diemban; dan
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan Evaluasi Kelembagaan, penataan kelembagaan perangkat daerah.

SASARAN 4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan
-----------	--

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan:			



	1. Anjab & ABK	100%	100%	100%
	2. Standar Kompetensi Jabatan	5%	-	-
	3. Evaluasi Jabatan	100%	-	-
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:			
	1. Anjab & ABK	27%	-	-
	2. Standar Kompetensi Jabatan	27%	-	-
	3. Evaluasi Jabatan	27%	-	-
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>16.66</b>

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4**  
**antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan:				
	1. Anjab & ABK	100%	100%	100%	100%
	2. Standar Kompetensi Jabatan	1%	100%	-	-
	3. Evaluasi Jabatan	100%	100%	-	-
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:				
	1. Anjab & ABK	-	-	-	-
	2. Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-	-
	3. Evaluasi Jabatan	-	-	-	-

**Tabel 2.16**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4**  
**Tahun 2019 dan 2020 serta Tahun akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan:			
	1. Anjab & ABK	100%	100%	100%
	2. Standar Kompetensi Jabatan	1%	-	100%
	3. Evaluasi Jabatan	100%	-	100%
2	Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:			100%
	1. Anjab & ABK	-	-	100%
	2. Standar Kompetensi Jabatan	-	-	100%
	3. Evaluasi Jabatan	-	-	100%

Jumlah jabatan ASN di Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku berjumlah sebanyak 5648 jabatan yang terdiri dari 1.329 jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Sebanyak 4.319 jabatan sesuai dengan peraturan teknis kementerian/lembaga terkait, hasil penataan analisa jabatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018; analisa beban kerja ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Beban Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018; Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanabagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel dibawah ini.

**Tabel 2.17**  
**Rekapitulasi Jabatan ASN di Lingkup Perangkat Daerah**  
**Pemda Provinsi Maluku**

No	Jenis dan Jumlah Jabatan		Jumlah Penataan Jabatan		
			Anjab & ABK	Standar Kompetensi Jabatan	Evaluasi Jabatan
1	JPT Tinggi Madya	1	1	1	1
2	JPT Tinggi Pratama	49	49	50	49
3	JPT Administrator	283	283	-	283
4	JPT Pengawas	996	996	-	996
5	JPT Pelaksana	3.248	3.248	-	3.248
6	JPT Fungsional	1.071	1.071	-	1.071
<b>Total</b>		<b>5.648</b>	<b>5.648</b>	<b>50</b>	<b>5.648</b>

Adapun Capaian Indikator kinerja “Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, dan Evaluasi Jabatan” Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan Anjab dan ABK Tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang ditetapkan. Penataan Anjab dan ABK pada Tahun 2020 dilakukan pada 82 UPTD dan Cabang Dinas dengan jumlah jabatan sebanyak 1163 jabatan.

Seluruh jabatan ASN (5.648 jabatan) pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku telah Penataan Anjab dan ABK pada Tahun 2020, akan tetapi penataan jabatan tersebut memiliki 2 (dua) dasar hukum yang menjadi rujukan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 sebanyak 1.163 jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 sebanyak 4.485 jabatan.

Capaian kinerja Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 5% tidak dapat tercapai, disebabkan karena anggaran kegiatan yang direncanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini mengalami refocusing anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dialihkan untuk penanganan covid 19.

Kondisi akhir jabatan ASN Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan Standar Kompetensi Jabatan sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 50 jabatan (jabatan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama) yang mana penataan tersebut dilakukan pada tahun 2019 yang lalu.

Capaian kinerja indikator “Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan Anjab & ABK, Standar Kompetensi Jabatan, dan Evaluasi Jabatan” tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung capaian kerjanya.

Sasaran kinerja “Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan” ditunjang oleh Program Peningkatan Reformasi Birokrasi, dengan Kegiatan Evaluasi Jabatan ASN, Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Pemda Provinsi Maluku, Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan TTP Pemda Provinsi Maluku. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 9 orang ASN.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 4.

**Tabel 2.18**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Sasaran Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil**  
**Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan**

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>417,600,000</b>	<b>403,536,500</b>	<b>96.63</b>
	Evaluasi Jabatan ASN	27,000,000	27,000,000	81.97
	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Pemda Provinsi Maluku	131,500,000	126,851,300	96.46
	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan TTP Pemda Provinsi Maluku	259,100,000	249,685,200	96.37
<b>T O T A L</b>		<b>417,600,000</b>	<b>403,536,500</b>	<b>96.63</b>

Untuk ditahun berikut dan tahun yang akan datang sasaran kinerja “Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Ketersediaan anggaran yang memadai sehingga seluruh indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan;
- 2) Penambahan ASN mengingat beratnya beban tugas yang diemban; dan
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan dan penataan analisis jabatan & analisis beban kerja, penataan standar kompetensi jabatan, dan penataan evaluasi jabatan.

SASARAN 5	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
-----------	---

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>100</b>

**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator Kinerja		2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.21**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5**  
**Tahun 2019 dan 2020 serta Tahun akhir periode Renstra**

Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “*Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%*” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” ditunjang oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Kegiatan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang ASN dan 2 orang tenaga honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 5.

**Tabel 2.22**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Sasaran Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran**  
**dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>403,668,013</b>	<b>396,372,650</b>	<b>98.19</b>

	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000	100
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32,197,308	31,259,520	97.09
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,093,773	24,092,000	99.99
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,587,700	24,587,550	100
	5. Penyediaan Makanan dan Minuman	20,400,000	20,390,000	99.95
	6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	161,600,000	159,005,500	98.39
	7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	128,789,232	125,038,080	97.09
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>57,800,000</b>	<b>57,800,000</b>	<b>100</b>
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11,000,000	11,000,000	100
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39,600,000	39,600,000	100
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,200,000	7,200,000	100
<b>TOTAL</b>		<b>461,468,013</b>	<b>454,172,650</b>	<b>98.42</b>

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, seperti penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan peralatan gedung kantor terutama pengadaan laptop dan printer.



## 2.4 Capaian Keuangan

Adapun analisis capaian keuangan Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Realisasi Anggaran**  
**Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja</b>	<b>1,411,046,650</b>	<b>1,372,663,237</b>	<b>97,28</b>
<b><i>Belanja Operasi</i></b>	1,400,046,650	1,361,663,237	97.26
Belanja Pegawai	37,200,000	37,200,000	100
Belanja Barang dan Jasa	1,362,846,650	1,324,463,237	97.18
<b><i>Belanja Modal</i></b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>100</b>
Belanja Modal Peralatan Mesin	11,000,000	11,000,000	100
<b>T O T A L</b>	<b>1,411,046,650</b>	<b>1,372,663,237</b>	<b>97,28</b>

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2020:

**Tabel 2.24**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja**  
**Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020**

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
<b>1. Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>403,668,013</b>	<b>396,372,650</b>	<b>7,295,363</b>	<b>98.19</b>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000	-	100
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32,197,308	31,259,520	937,788	97.09
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,093,773	24,092,000	1,773	99.99
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,587,700	24,587,550	150	100
5. Penyediaan Makanan dan Minuman	20,400,000	20,390,000	10,000	99.95
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	161,600,000	159,005,500	2,594,500	98.39

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>%</b>
7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	128,789,232	125,038,080	3,751,152	97.09
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>57,800,000</b>	<b>57,800,000</b>	-	<b>100</b>
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11,000,000	11,000,000	-	100
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39,600,000	39,600,000	-	100
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,200,000	7,200,000	-	100
<b>3. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>638,367,837</b>	<b>607,930,787</b>	<b>30,437,050</b>	<b>95.23</b>
1. Evaluasi Jabatan ASN	27,000,000	27,000,000	-	100
2. Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Pemda Provinsi Maluku	131,500,000	126,851,300	4,648,700	96.46
3. Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik	77,343,000	67,605,650	9,737,350	87.41
4. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku	62,200,000	55,563,800	6,636,200	89.33
5. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	43,722,500	43,722,500	-	100
6. Rapat Koordinasi Bidang Pengorganisasian	37,502,337	37,502,337	-	100
7. Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan TTP	259,100,000	249,685,200	9,414,800	96.37

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>%</b>
Pemda Provinsi Maluku				
<b>4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>274,010,800</b>	<b>273,359,800</b>	<b>651,000</b>	<b>99.76</b>
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	132,300,000	132,300,000	-	100
2. Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	141,710,800	141,059,800	651,000	99.54
<b>T O T A L</b>	<b>1,373,846,650</b>	<b>1,335,463,237</b>	<b>38,383,413</b>	<b>97.21</b>

## 2.5 Masalah dan Hambatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja bahwa secara umum kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020 adalah **“Sangat Baik”**, namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum masalah dan hambatan pencapaian kinerja meliputi:

- a. Pengorganisasian. Sebagaimana diketahui bahwa pengorganisasian dimaksudkan untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi terselenggaranya program/kegiatan. Pengorganisasian sumber-sumber inilah yang belum dilakukan secara jelas dan rinci sehingga menjadi salah satu faktor kegiatan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya;
- b. Personil. Kesiapan penyelenggara kegiatan terutama kemampuan teknis operasional masih sangat terbatas, disamping multi persepsi dari masing-masing personil turut menghambat terlaksananya program/kegiatan.

## 2.6 Solusi pemecahan Masalah dan Hambatan

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2020, maka solusi yang perlu yang diambil oleh Biro Organisasi Setda Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan.

- b. Melakukan cek dan ricek kesiapan teknis operasional dan kerja sama dengan pihak ketiga (tim asistensi, perguruan tinggi, LSM) untuk ikut serta dalam penyelesaian program/kegiatan yang ditetapkan.

Diakui bahwa belum sepenuhnya masalah dan hambatan pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2020 telah teratasi. Oleh karenanya akan tetap mendapat perhatian pada tahun berikutnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku, pada bab II Paragraf 7, pasal 11 disebutkan bahwa “Biro Organisasi bertugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam pengorganisasian penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang organisasi”.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Oleh karena itu Biro Organisasi berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun rencana kerja secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahun.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan Rencana Kerja Biro Organisasi tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran rencana kerja Biro Organisasi tahun 2022 adalah untuk mencapai hasil dari program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Maluku.

#### **3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022**

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**b. Program Penataan Organisasi;**

1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3. Penataan Analisa Jabatan;
4. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
6. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
7. Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan;
8. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Lokasi program dan kegiatan pada Kota Ambon, Kabupaten/Kota dan Jakarta. Pagu Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 4.298.839.913,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 memuat program dan kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dengan harapan agar rencana kerja ini dapat memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi peningkatan dan pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian rencana kerja Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2022 agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ambon, April 2021

Plt. Kepala Biro Organisasi  
Setda Maluku,

  
**DAVID S. KATAYANE, SE. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670604 200003 1 007

# LAMPIRAN



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 SUMBER DANA APBD  
PROVINSI MALUKU**

URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
SKPD

: 4.01. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
: 4.01.03. BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU

KODE	PRIORITAS/FOKUS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023					
				LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
				KAB/KOTA	KEC.	DESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9					
4		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH													
4	01	BIRO ORGANISASI													
4	01	4.01.03.08													
		Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik						4.381.007.093		4.573.574.528					
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.231.007.093		1.266.074.528					
4	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP Tahun 2020 dan Dokumen PK Tahun 2021	AMBON			2 Dokumen	250.000.000		2 Dokumen	262.500.000
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Daerah									
4	01	01	1	02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Tunjangan Pengelola Keuangan OPD	AMBON			10 Orang	48.420.000		10 Orang	50.841.000
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Daerah									
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Pergub Tentang TPP Provinsi Maluku	AMBON			1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	210.000.000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	AMBON			3 Unit	64.500.000		3 Unit	67.725.000

KODE	PRIORITAS/FOKUS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				KAB/KOTA	KEC.	DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	
4	01 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	AMBON			12 Bln	31.000.000		12 Bln	32.550.000
4	01 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	AMBON			12 Bln	40.082.700		12 Bln	42.086.835
4	01 01 1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Kunjungan Tamu	AMBON			12 Bln	34.720.000		12 Bln	36.456.000
4	01 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Kementerian Terkait	AMBON			14 Kali	252.201.000		14 Kali	252.201.000
4	01 01 1 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
4	01 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Jasa Surat Menyurat	AMBON			12 Bln	20.456.000		12 Bln	21.478.800
4	01 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	AMBON			12 Bln	227.569.393		12 Bln	227.569.393
4	01 01 1 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5	01 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara Dengan Baik	AMBON			1 Unit	49.888.000		1 Unit	49.888.000
6	01 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Gedung Kantor Terpeliharaan Dengan Baik	AMBON			12 Bln	12.170.000		12 Bln	12.778.500
4	01 02	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>						<b>3.150.000.000</b>			<b>3.307.500.000</b>
4	01 02 1 01	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan</b>									
4	01 02 1 01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya penataan kelembagaan OPD lingkup Pemda Provinsi Maluku	AMBON			3 OPD	300.000.000		3 OPD	315.000.000

KODE	PRIORITAS/FOKUS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				KAB/KOTA	KEC.	DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	
4	01 02 1 01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi kelembagaan OPD kab/kota se-Maluku	Kab. Buru Selatan, Kab. SBB, Kota Tual			3 Dokumen	300.000.000		3 Kab/Kota	315.000.000
4	01 02 1 01 03	Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya jabatan yang ditetapkan nilai dan kelas jabatannya	AMBON			2 Dokumen	700.000.000		2 Dokumen	735.000.000
4	01 02 1 02	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>									
4	01 02 1 02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penerapan RB pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	AMBON			1 Dokumen	300.000.000		1 Dokumen	315.000.000
4	01 02 1 02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya	Kota Ambon, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara			1 Dokumen	350.000.000		4 Kab/Kota	367.500.000
4	01 02 1 02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah OPD yang difasilitasi penyelenggaraan budaya kerja	AMBON			15 OPD	250.000.000		35 OPD	262.500.000
4	01 02 1 02 04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pengorganisasian	AMBON			22 OPD	250.000.000		35 OPD	262.500.000
4	01 02 1 02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan evaluasi pelayanan publiknya	Kota Ambon, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Serma Timur, SBB			1 Dokumen	700.000.000		4 Kab/Kota	735.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>4.381.007.093</b>		<b>4.573.574.528</b>	